

# Pluralisme dan multikulturalisme: Pembentukan masyarakat madani

**M. Alfian Rizky**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250603110023@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Pluralisme, multikulturalisme, masyarakat beradab, konflik sosial, pendidikan islam.

## Keywords:

Pluralism, multiculturalism, civilized society, social conflict, islamic education

## ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam (pluralistic society) dalam hal suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sehingga, pluralisme serta multikulturalisme dapat menimbulkan pemahaman bahwa setiap individu merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab untuk hidup secara bersama dalam komunitasnya. Realitas yang tidak dapat diabaikan adalah adanya keragaman yang muncul dari suku, budaya, bahasa, dan agama yang sering dipaksakan dalam pemahaman yang tidak sejalan, antara kelompok minoritas dan mayoritas, serta berbeda dalam strata ekonomi dan sosial yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan sebagai permasalahan yang berpotensi menjadi konflik. sehingga, agar pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, masyarakat Indonesia perlu mengembangkan

nilai-nilai multikulturalisme di dalam suku, agama, bahasa, dan budaya. Dengan diterapkannya pluralisme dan multikulturalisme, Maka Masyarakat Indonesia ke depannya akan menjadi Masyarakat yang beradap.

## ABSTRACT

Indonesia is known as a pluralistic society in terms of ethnicity, language, customs, and religion. Therefore, pluralism and multiculturalism can create an understanding that every individual feels valued and has a responsibility to live together in their community. A reality that cannot be ignored is the existence of diversity that arises from ethnicity, culture, language, and religion that is often forced into an incompatible understanding, between minority and majority groups, as well as differences in economic and social strata that can give rise to differences of opinion as a problem that has the potential to become a conflict. Therefore, for pluralism and multiculturalism in Indonesia to run effectively, Indonesian society needs to develop the values of multiculturalism in ethnicity, religion, language, and culture. By implementing pluralism and multiculturalism, Indonesian society in the future will become a civilized society.

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai perbedaan, seperti suku, bahasa, dan agama. Sesungguhnya, keberagaman ini seharusnya menjadikan kita pengikat untuk membangun harmoni di antara sesama. Namun, kenyataannya, perbedaan sering kali menimbulkan konflik dan ketegangan. Meskipun kemajemukan terjadi sebagaimana merupakan bagian dari sunnatullah, yang sama



halnya dengan penciptaan langit dan bumi. Penolakan terhadap kemajemukan berarti secara tidak langsung menolak kehendak-Nya.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, wacana tentang pluralisme dan multikulturalisme semakin penting. Namun, kesalahpahaman terhadap kedua istilah ini sering memicu masalah baik dalam pemahaman konsepnya maupun dalam dampak sosial dan politik di Indonesia. Interpretasi yang keliru tentang pluralisme dan multikulturalisme dapat menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang mengganggu dan mengancam keutuhan negara, misalnya konflik SARA. Karena Indonesia adalah negara yang beragam dalam bahasa, suku, bangsa, adat, budaya. Karena itulah para pendiri Negara Republik Indonesia menetapkan semboyan pada lambang Pancasila, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika,”.

Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan masyarakatnya yang beragam. Keberagaman ini tampak jelas dalam kondisi sosial masyarakatnya. Kemajemukan tersebut terbentuk dari berbagai perbedaan, baik secara horizontal, seperti keberadaan kelompok-kelompok sosial berdasarkan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Namun, terdapat pula perbedaan secara vertikal, yaitu perbedaan antara lapisan masyarakat atas dan bawah dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Sejalan dengan pandangan H.A.R. Tilaar, masyarakat multikultural memiliki banyak potensi kekuatan dari setiap kelompok yang ada, namun di dalamnya juga tersimpan kemungkinan munculnya konflik. Benturan antar budaya, suku, ras, etnik, serta perbedaan nilai yang berlaku dapat menjadi sumber munculnya perpecahan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan disintegrasi dalam bangsa Indonesia (Ika et al., n.d.).

Pendidikan multikultural di Indonesia tergolong baru dan masih belum terlaksana seperti di Amerika Serikat. Akhir-akhir ini Pendidikan multikultural sering menjadi topik pembicaraan di Indonesia setelah rezim orde baru dan berakhirnya masa jabatan Suharto pada tahun 1998. Dengan berakhirnya yang telah menerapkan “keseragaman” menghasilkan pengakuan terhadap warisan multicultural Indonesia yang sangat beragam. Indonesia merupakan salah satu negara multicultural terbesar didunia, dengan kekayaan social budaya yang dan geografis yang sangat luas. Yaitu 17.000 pulau besar dan kecil di Indonesia, dan populasinya sekitar 270 juta orang yang terdiri dari 1.000 kelompok etnis berbeda yang menggunakan hampir 700 bahasa daerah dan bahasa Indonesia, selain itu masyarakat Indonesia menganut berbagai kepercayaan, di Indonesia terdapat enam agama antaranya yaitu Kristen, islam, budha, konghucu, hindu dan protestan (Sulistyawati, 2026).

Konflik kekerasan yang melibatkan etnis dan suku sudah pernah terjadi pada masa orde baru, yaitu pada tahun 1967, 1968, 1977, 1978, 1979, 1983, dan 1993. Menjelang era reformasi, ketegangan bernuansa SARA kembali mencuat pada tahun 1996-1997, seperti peristiwa di Sambas, tragedi di Sampit, serta konflik yang terjadi di Ambon dan di Poso.

Setelah reformasi, berbagai bentuk konflik dan kekerasan semakin meluas, seperti insiden pada tahun 2008 yang melibatkan pertentangan antara aliansi kebangsaan untuk kebebasan berkeyakinan dan beragama dengan organisasi Front Pembela Islam. Peristiwa-peristiwa itulah yang perlahan menggerus keragaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

## Pembahasan

### Paradigma Kebangsaan Berbasis Pluralisme dan Multikulturalisme

Secara etimologis, istilah pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralism. Dalam bahasa Indonesia berarti “Dalam ilmu-ilmu sosial, pluralisme adalah suatu kerangka interaksi di mana kelompok-kelompok menunjukkan rasa hormat dan toleransi yang memadai satu sama lain, sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi secara produktif tanpa konflik maupun asimilasi”.

Pengakuan terhadap pluralisme dalam kehidupan sosial juga dikemukakan oleh Mukti Ali. Sesuai pendapatnya, keberagaman dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak perlu dipermasalahkan. Akan tetapi, dalam persoalan teologis, ia bersikap tegas dikarenakan keyakinan agama tidak dapat dicampuradukkan atau dikompromikan. Dengan demikian, pada objek yang sama, setiap pemeluk agama memiliki pandangan teologis yang berbeda, seperti dalam memahami al-Qur’an, Bibel, Nabi Muhammad, Yesus, maupun Mariam. (Hanik et al., 2014).

Menurutnya, Dalam ajaran Islam, umat Muslim menaruh penghormatan yang tinggi kepada Mariam dan Nabi Isa sebagai bagian dari keyakinan iman mereka. Walaupun umat Islam tidak meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, mereka tetap mengimani beliau sebagai nabi utusan Allah sebagaimana Nabi Muhammad saw. Selain mengakui Al-Qur’an sebagai kitab suci, umat Islam juga meyakini bahwa Taurat dan Injil pada dasarnya merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Namun, muncul pertanyaan mengenai keaslian Bibel yang ada saat ini, baik dari segi keotentikan maupun kesesuaian seluruh isinya sebagai wahyu Tuhan. Kendati demikian, umat Islam tidak menolak wahyu yang pernah diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan para rasul lainnya, hanya saja mereka tidak meyakini bahwa seluruh isi Bibel yang beredar sekarang sepenuhnya merupakan firman Allah. Meski begitu, umat Islam tetap percaya bahwa di dalam Bibel masih terdapat ajaran dan kalam Tuhan.

Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa “pluralisme agama berarti semua agama merupakan jalan kebenaran yang mengarah kepada Tuhan”. Sesuai pendapatnya, keragaman agama bukan sekadar fenomena sosial, melainkan bukti bahwa kebenaran itu sendiri hadir dalam berbagai bentuk. Pluralisme agama tidak hanya dilihat sebagai kenyataan sosial yang terpisah, akan tetapi harus dipahami sebagai gambaran nyata tentang keberagaman kebenaran tersebut. Sejalan dengan pemikiran Madjid, Hick berpendapat bahwa pluralisme agama menggambarkan Tuhan sebagai pusat yang dikelilingi beragam agama, di mana setiap kelompok keagamaan mendekati Tuhan melalui jalannya masing-masing. Sementara itu, gagasan Nasr mengenai Islam pluralis didasarkan pada keyakinan bahwa setiap agama pada dasarnya tersusun atas dua aspek, yaitu formulasi ajaran dan pengalaman keimanan (Keindonesiaan, 2017).

Secara teologis, pluralisme dipahami sebagai pandangan filsafat yang tidak menyederhanakan seluruh realitas ke dalam satu prinsip tunggal, melainkan mengakui adanya keberagaman dalam ranah budaya, politik, maupun agama. Sementara itu, dalam perspektif sosiologis, pluralisme menggambarkan suatu tatanan yang menerima

keberadaan berbagai kelompok dengan ciri khas masing-masing yang hidup berdampingan.

Pluralisme dipahami sebagai pandangan yang berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat tersusun atas berbagai kelompok yang beragam. Konsep ini tidak bermaksud menyamakan seluruh budaya atau agama, melainkan justru menegaskan adanya perbedaan di antara masing-masing kelompok. Selain itu, ada tiga istilah yang kerap dipakai untuk menggambarkan keberagaman Masyarakat baik dalam hal ras, agama, bahasa, maupun budaya, yakni pluralitas, keragaman, dan multikultural.

Multikulturalisme dapat dipahami sebagai keberagaman budaya. Secara etimologis, istilah ini berasal dari gabungan kata multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, serta isme yang merujuk pada aliran atau paham. Pada makna yang lebih mendasar, istilah ini mengandung pengakuan terhadap martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya masing-masing, dengan budaya yang khas dan berbeda.

Multikulturalisme pada hakikatnya merupakan konsep yang menegaskan bahwa sebuah komunitas dalam konteks kehidupan berbangsa harus dapat menerima keberagaman, perbedaan, serta kemajemukan budaya, baik yang berbentuk ras, suku, etnis, maupun agama. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa bangsa yang bersifat plural adalah bangsa yang dihuni oleh berbagai budaya atau multikultur. Sehingga, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sebuah paham dan gerakan sosial yang menuntut adanya penghormatan serta pengakuan atas keberagaman, baik antara komunitas yang berbeda maupun antara komunitas dan negara. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman etnis dan budaya, pemahaman tentang multikulturalisme belum sepenuhnya mengakar, karena konsep ini menuntut kesetaraan di antara seluruh budaya yang ada.

Pluralisme bukan sekadar soal mengakui bahwa ada banyak kelompok, budaya, dan agama yang hidup berdampingan di sekitar kita (Chamidah et al., 2026). Maka dari itu, kita dituntut untuk benar-benar terlibat dan merespons kenyataan bahwa masyarakat kita memang beragam. Orang yang punya sikap pluralis bisa dilihat dari caranya bergaul, ia mampu berinteraksi dengan baik bersama siapa saja, meski latar belakang mereka sangat berbeda. Dalam kehidupan beragama, pluralisme artinya kita tidak cukup hanya bilang "oke, agama lain itu ada dan sah." Kita perlu selangkah lebih jauh mencoba memahami apa yang membuat kita sama dan apa yang membedakan kita dengan pemeluk agama lain. Dari situ, hubungan yang harmonis bisa tumbuh, bukan sekadar toleransi yang dingin dan berjarak (Azizah, 2025).

### **Dampak Pluralisme dan Multikulturalisme pada Aspek Sosial-Politik**

Di tengah arus globalisasi informasi dan teknologi yang begitu cepat serta penuh dengan perbedaan, masyarakat kini saling memengaruhi dalam berbagai bentuk interaksi. Proses saling memengaruhi ini dapat menimbulkan dominasi budaya maupun politik tertentu. Jika dominasi tersebut tidak diimbangi, dikhawatirkan akan memicu konflik atau ketegangan yang dapat menguasai ruang budaya dan politik, bahkan mengancam identitas bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman budaya.

Tilaar membedakan multikulturalisme ke dalam dua tahap pemahaman. Tahap pertama, yang disebut sebagai multikulturalisme tradisional atau gelombang awal, memiliki dua ciri utama: kebutuhan akan pengakuan serta legitimasi terhadap keberagaman atau pluralitas budaya. Pada fase perkembangan berikutnya, yang dikenal sebagai gelombang kedua, multikulturalisme mulai merangkul berbagai gagasan baru. Pertama, muncul pendekatan kritis terhadap isu-isu penting dalam kebudayaan modern, seperti persoalan identitas kelompok, ketimpangan distribusi kekuasaan dalam masyarakat yang masih bersifat diskriminatif, posisi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, gerakan feminisme, serta berbagai isu kontemporer lainnya termasuk toleransi antaragama dan antar kelompok sosial (Ika et al., n.d.).

Kedua, berkembangnya pemikiran post-kolonialisme. Pendekatan ini meninjau kembali hubungan antara negara-negara bekas penjajah dan wilayah-wilayah yang pernah dijajah, yang kerap meninggalkan warisan pemikiran yang merendahkan pihak terjajah. Post-kolonialisme berupaya mengangkat kembali nilai-nilai asli atau indigenous budaya lokal dan menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya asing.

Ketiga, hadirnya isu globalisasi. Proses globalisasi telah melahirkan budaya global yang cenderung mengikis kekayaan budaya lokal. Karena itu, muncul dorongan untuk menolak arah globalisasi yang homogen dengan cara menghidupkan kembali budaya-budaya lokal sebagai penegasan identitas serta sebagai bentuk penolakan terhadap kecenderungan monokultural budaya dunia.

Keempat, berkembangnya gerakan feminisme dan pemikiran post-feminisme. Jika awalnya feminisme memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak dan kesempatan, kini gerakan ini bergerak ke arah hubungan kemitraan. Perempuan tidak lagi hanya menuntut pengakuan setara dalam peran yang sama, tetapi ingin ditempatkan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima, masuknya gagasan post-strukturalisme. Pemikiran ini menekankan perlunya upaya dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap struktur sosial yang sudah mapan, karena struktur tersebut sering kali hanya mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa inti dari konsep ini adalah kesediaan untuk menerima keberadaan kelompok lain secara setara, tanpa mempersoalkan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, maupun agama. Jika pluralitas hanya menunjukkan adanya keberagaman atau kenyataan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok, maka multikulturalisme menegaskan bahwa seluruh perbedaan tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam ruang publik.

Multikulturalisme muncul sebagai bentuk respons baru terhadap keragaman sosial. Artinya, keberadaan kelompok yang beragam saja tidaklah cukup; yang lebih penting adalah bagaimana negara memperlakukan seluruh kelompok tersebut secara adil dan setara. Dengan demikian, multikulturalisme menjadi sebuah gerakan yang menuntut adanya pengakuan untuk seluruh perbedaan sebagai entitas sosial yang harus dihormati, dilindungi, serta dijamin keberadaannya.

Keberagaman dalam masyarakat merupakan kondisi yang sangat kompleks, mencakup berbagai perbedaan yang secara alami dimiliki individu maupun kelompok, serta perbedaan yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan kemudian diterima sebagai pemahaman bersama. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya menggambarkan fakta kemajemukan, tetapi juga menuntut perlakuan setara bagi semua kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ancaman-ancaman tersebut berpotensi melemahkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama tidak dapat dipungkiri. Di sisi lain, ketika keberagaman tersebut dipaksakan untuk dipahami secara seragam tanpa dilandasi pemahaman yang mendalam, maka perbedaan antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta berbagai lapisan sosial dan ekonomi, sering kali dianggap sebagai persoalan yang mengandung risiko konflik. Pemaksaan persatuan dalam kondisi demikian justru dapat menumbuhkan sikap negatif terhadap keragaman.

Dengan adanya sikap keragaman negatif dapat menimbulkan berbagai dampak buruk dalam kehidupan sosial dan politik, terutama dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Dampak tersebut antara lain:

1. Munculnya euforia kebebasan yang berlebihan sehingga memicu potensi disintegrasi sosial dan politik.
2. Berkurangnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan, yang pada akhirnya membuat seseorang cenderung membenarkan segala cara demi mencapai tujuan (pikiran yang buruk).
3. Mudah terprovokasi hingga melakukan tindakan kekerasan dan anarkisme yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara
4. Menurunnya penghargaan terhadap hukum, etika, dan moral, sehingga memicu penyebaran narkoba serta berbagai penyakit sosial lainnya
5. Timbulnya disorientasi, dislokasi, serta krisis sosial-budaya akibat pengaruh globalisasi yang kian meluas dan memunculkan pola hidup yang bertentangan dengan nilai budaya Indonesia.

Sesuai pendapat Zakiyuddin Baidhawiy, agar pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia dapat berjalan dengan baik, masyarakat harus menumbuhkan nilai-nilai multikultural yang berkaitan erat dengan manusia, kemanusiaan, dan budaya. Nilai-nilai tersebut antara lain belajar hidup dalam perbedaan, membangun kepercayaan satu sama lain, memelihara sikap saling memahami, menjunjung tinggi penghormatan terhadap sesama, bersikap terbuka dalam berpikir, mengembangkan apresiasi serta ketergantungan positif antarindividu, mampu menyelesaikan konflik, dan membangun rekonsiliasi tanpa kekerasan (Ruswandi et al., 2022)

Jika pemikiran Zakiyuddin Baidhawiy ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam praktik keagamaan masing-masing maupun dalam interaksi antarumat beragama, maka akan tercipta kemampuan untuk hidup dalam perbedaan, saling menghargai, dan pada akhirnya membangun kerukunan antaragama. Dengan demikian,

Indonesia berpotensi menjadi negara yang damai dan sejahtera meskipun memiliki keragaman agama yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan politik. Keragaman ini justru dapat menjadi landasan untuk membangun Indonesia sebagai negara yang kaya budaya, suku, bahasa, dan agama sebuah masyarakat madani yang dalam perspektif Islam digambarkan sebagai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Dengan keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, penerapan sikap toleransi sangat penting. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah: Dialog Antar Agama dan Budaya dalam Memperkuat Identitas Nasional, Membangun Toleransi dan Pengertian, Mencegah Konflik Sosial, Memupuk Rasa Persatuan, Mendorong Kerjasama Sosial, Memperkuat Identitas Nasional yang Inklusif.

Sesuai pendapat (Faslah, 2024), dialog antar agama dan budaya punya peran yang luar biasa dalam memperkuat rasa kebangsaan kita sebagai orang Indonesia. Lewat dialog inilah toleransi dibangun, potensi konflik diredam, dan rasa persatuan terus dipupuk semuanya membentuk pondasi bagi masyarakat yang damai dan terbuka untuk semua. Di sisi lain, mengingat Indonesia adalah negara yang luar biasa beragam, dialog semacam ini bukan cuma "bagus untuk dilakukan" ini adalah langkah strategis yang memang harus diambil jika kita serius ingin membangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh rakyat. Pada akhirnya, melalui dialog inilah kita bisa bersama-sama merayakan perbedaan yang kita miliki, sekaligus mempertegas bahwa kita tetap satu satu bangsa, satu identitas, meski datang dari berbagai latar belakang yang berbeda (Faslah, 2024).

### **Pendidikan Islam Sebagai Pondasi Dasar Masyarakat**

Islam adalah agama yang membawa ajaran yang utuh dan menyeluruh. Ajaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan lainnya, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika sosial yang menjadi pedoman bagi manusia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama yang merepresentasikan kelengkapan ajaran Islam, mengingat di dalamnya terkandung petunjuk yang komprehensif untuk berbagai aspek kehidupan.

Pendidikan Islam dalam Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam dipahami sebagai suatu upaya sadar yang diselenggarakan secara sistematis untuk membentuk peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pada dasarnya, paradigma pendidikan Islam merupakan proses internalisasi dan transmisi nilai-nilai budaya Islam guna memberdayakan serta mengembangkan potensi manusia, sekaligus menjadi sarana melahirkan nilai-nilai budaya Islam yang baru melalui interaksi antara potensi tersebut dan perkembangan zaman yang terus bergerak maju di berbagai aspek kehidupan (Mahmudi, 2023).

Paradigma pendidikan dibangun di atas empat pilar utama, dengan pilar pertama berupa pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh warga Masyarakat. Pilar kedua dalam paradigma pendidikan adalah pendidikan yang bersifat demokratis. Pilar ketiga dalam paradigma pendidikan adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan lokal. Pilar keempat dalam paradigma pendidikan adalah tercapainya keseimbangan antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemuliaan dan tidak dapat dikalahkan oleh apa pun, serta mengakui bahwa keberagaman merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, pendidikan agama Islam diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai pembentukan kepribadian manusia berdasarkan al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam aspek akidah, akhlak, dan ibadah. Ketiga aspek tersebut ditujukan untuk menumbuhkan sifat-sifat seperti iman dan takwa kepada Allah SWT, kejujuran, keadilan, kesabaran, kecerdasan, kedisiplinan, tenggang rasa, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting bagi kehidupan bersama dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ajaran Islam yang bersifat multi-interpretatif menunjukkan bahwa keragaman adalah bagian dari tradisi Islam itu sendiri. Dengan demikian, Islam tidak bisa dipahami secara tunggal; perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan politik akan melahirkan pemaknaan yang berbeda-beda. Mengingat kemajemukan adalah kenyataan yang tak dapat ditolak, umat Islam harus bersikap toleran, terbuka, dan dinamis. Konflik yang muncul dari perbedaan hanya dapat diatasi melalui pluralisme, yaitu kesadaran bahwa keragaman budaya, ideologi, keyakinan, dan ras merupakan fakta ciptaan Tuhan (Q.S. al-Rum: 22). Pluralisme tidak boleh dipahami sebagai dikotomi atau hierarki, melainkan sebagai proses saling melengkapi untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama.

### **Penguatan Keragaman dan Multikulturalisme sebagai Fondasi Masyarakat Madani**

Masyarakat madani adalah masyarakat ideal yang mandiri, berkembang sesuai budaya, adat, dan agama, serta menjunjung nilai keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, kesejahteraan, kebebasan, pluralisme, dan perlindungan bagi minoritas. Jama (2023) mengemukakan bahwa masyarakat madani berkembang dari “kesadaran etis warga negara,” bukan sekadar perangkat hukum negara. Kesadaran etis tersebut bersumber dari nilai Pancasila. Masyarakat madani tidak terbentuk hanya karena adanya peraturan hukum atau kebijakan pemerintah, melainkan lebih ditentukan oleh kesadaran moral setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran moral tersebut tercermin dalam sikap saling menghargai, toleransi, kerja sama, kejujuran, serta rasa tanggung jawab terhadap sesama yang berkembang dari dalam diri masyarakat. Di Indonesia, nilai-nilai itu berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa. Setiap sila dalam Pancasila memuat nilai etika, seperti sila kemanusiaan yang menanamkan penghormatan terhadap hak orang lain, sila persatuan yang memperkuat rasa kebersamaan, dan sila keadilan sosial yang mengarahkan masyarakat pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, terwujudnya masyarakat madani bergantung pada kesediaan warga negara untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Prasetyo et al., 2025).

Ali Maschan Musa menambahkan bahwa masyarakat madani mencakup nilai demokrasi, transparansi, toleransi, partisipasi, integrasi, emansipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi dengan demokrasi sebagai prinsip utamanya, karena hanya dalam iklim demokratis masyarakat madani dapat berkembang.

Masyarakat madani yang ideal memiliki beberapa ciri utama. Pertama, masyarakat yang beriman, memahami ajaran agama, dan mampu hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kedua, masyarakat yang demokratis dan menghargai perbedaan pendapat sambil mengutamakan kepentingan bangsa. Ketiga, masyarakat yang melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, memilih agama, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan hukum. Keempat, masyarakat yang tertib dan sadar hukum. Kelima, masyarakat yang kreatif, mandiri, dan berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, masyarakat yang kompetitif namun tetap menjunjung nilai kerja sama dan kemanusiaan universal.

## Kesimpulan dan Saran

Pluralisme pada dasarnya merupakan upaya menumbuhkan kesadaran manusia baik secara teologis maupun social bahwa kehidupan berlangsung di tengah realitas masyarakat yang beragam. Keragaman tersebut meliputi perbedaan agama, budaya, etnis, serta identitas sosial lainnya yang hidup berdampingan dalam satu komunitas. Kesadaran plural ini penting agar masyarakat mampu memahami bahwa keberagaman bukan sekadar fakta sosial, tetapi juga menjadi tuntutan moral untuk saling menghormati dan hidup bersama secara damai.

Indonesia merupakan negara yang sangat multikultural, baik dari segi suku bangsa, adat istiadat, maupun budaya lokal. Sehingga, pemahaman masyarakat terhadap konsep multikulturalisme masih sering terbatas. Multikulturalisme tidak hanya mengakui adanya perbedaan, tetapi juga menekankan pentingnya kesederajatan budaya serta penghormatan terhadap semua identitas sosial tanpa adanya hierarki atau dominasi. Sehingga, pluralisme lebih menekankan pada kesadaran individu mengenai hak-hak personal, kebebasan memilih, serta proses komunikasi antarmanusia, yang sering kali beririsan dengan nilai-nilai liberal. Di sisi lain multikulturalisme dibangun atas kesadaran kolektif suatu komunitas untuk menciptakan masyarakat madani yang menghargai perbedaan etnik, agama, dan identitas demi memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks agama, Islam merupakan agama yang inklusif dan terbuka. Islam memberi ruang kebebasan berpikir bagi pemeluknya dan mengajarkan pentingnya menjalin hubungan baik dengan sesama manusia tanpa melihat perbedaan latar belakang. Islam juga mendorong umatnya untuk melakukan dialog secara santun guna mencari kebenaran yang hakiki. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat modern yang semakin majemuk.

Masyarakat yang plural, tempat berbagai suku, etnis, bangsa, dan agama hidup berdampingan, tentu menghadapi tantangan tersendiri. Untuk dapat hidup harmonis di tengah keragaman tersebut, masyarakat harus mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan karakter multikultural. Nilai-nilai yang perlu ditumbuhkan antara lain sikap inklusif, humanisme dan egalitarianisme, toleransi terhadap perbedaan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Sikap-sikap ini menjadi fondasi terbentuknya masyarakat madani-multikultural, yaitu masyarakat yang mampu merayakan perbedaan namun tetap bersatu dalam nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

## Daftar Pustaka

- Azizah, E. (2025). Implementasi pendidikan multikulturalisme berbasis nilai budaya lokal dalam pengajaran di jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. 3, 564–573.
- Chamidah, N., Nasith, A., & Efiyanti, A. Y. (2026). From Pluralism to Tolerance: The Role of Project-Based Social Studies Learning in Islamic Schools. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, <http://repository.uin-malang.ac.id/27370/>
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Hanik, U., Perspektif, B., & Agama, P. (2014). Pluralisme agama di indonesia. 25, 44–63.
- Ika, B. T., Tilaar, H. A. R., & Kunci, K. (n.d.). Konsep Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme Perspektif Har. Tilaar Nurul Hidayati ( IAI Uluwiyah Mojokerto ). 44–67.
- Keindonesiaan, K. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan Catur Widiat Moko. 06, 63–82.
- Mahmudi, Z. (2023). Fiqh Peradaban: Dialektika Islam, Pesantren Dan Budaya Nusantara Untuk Kemaslahatan Bangsa. *Militansi Santri Dalam Menyongsong Indonesia Emas*. <http://repository.uin-malang.ac.id/19575/>
- Prasetyo, A., Rifai, I., Adinata, W. N., Ramadhan, Z. A., Mesin, P. T., Maret, U. S., Mesin, P. T., Maret, U. S., Mesin, P. T., Maret, U. S., Mesin, P. T., & Maret, U. S. (2025). Peran pancasila dalam membangun tatanan sosial demokratis menuju terwujudnya masyarakat madani indonesia. 02, 41–46.
- Ruswandi, U., Erihadiana, M., & Saepurahman, A. (2022). Kajian Riset Pluralisme dan Multikulturalisme. 6, 777–787.
- Sulistyawati, S. M. (2026). Pancasila dan pluralisme Indonesia: Strategi penguatan toleransi beragama dan integrasi sosial. 4, 224–231.